

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Kadir Muhammmad, *Etika Profesi Hukum*, (Citra Aditya Bakti : Bandung,2006).
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, (Sinar Grafika : Oktober 2016).
- Ahmad Ali, *Menguak Takbir (Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Chandra Pratama : Jakarta)
- , *Yusril Vs Criminal Justice System*. (Makasar Umitoha : 2010)
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Sinar Grafika : Jakarta, Juni 2014)
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang pasti dan Berkeadilan, Cetakan ke-2* (Yogyakarta : UII Pres.2006).
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Pres.2007).
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*. (Sinar Grafika : Februari 2016).
- , *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya : Jakarta, 2006).
- Black, Herry Campbel, *Black's Law Dictionary. Edisi VI*. (West Publishing. St. Paul Minnesota.1999).
- CST Kansil, Cristine ST Kansil, *Hukum Tata Negara RI. Jakarta*, (Rineka Cipta, 2008).
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem penegakan Hukum di Indonesia*, (Prenadamedia Group : Jakarta. 2017).
- Gramedia Press, *3 Kitab Undang-Undang Hukum KUHPer, KUHP, KUHP beserta penjelasannya*, (Gramedia Jakarta, 2016).
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang KPK*, (Bhuana Ilmu Popoler : Jakarta.2017).
- Indriyanto Seno Adji, *Praperadilan & KUHP (Catatan Mendatang)*, (Diadit Media : Cetakan pertama, 2015
- Jazim Hamidi, *Harmeneutika Hukum. Trori Penemuan Hukum baru dengan Interpretasi teks*, (Yogyakarta UII Press).
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Konpres. Jakarta. Cetakan ke-empat.2014).

- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sidat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Study Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudens*, (PT. Alumni-Bandung, 2013).
- Marbun Maqdir Ismail, SF. dan Mohammad Ikhsan, *Himpunan Putusan Tentang Praperadilan*, (FH. UII Press, Yogyakarta Cetakan Pertama, Juni 2017).
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta : Cetakan keenam.2000).
- Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana dan Pidana Khusus*, (Liberty Yogyakarta : Cetakan Pertama, 2009).
- , *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, (Pustaka Belajar : Yogyakarta. Cetakan I. 2010).
- , *Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian Titik Singgung Perkara Pidana Dengan Perkara Perdata dan Tindak Pidana Ekonomi*, (Calpulis. 2016).
- M. Adi Toegarisman, *Pemberantasan Korupsi Dalam Paradigma Efisiensi*, (Buku Kompas : Jakarta 2017).
- Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern Dalam Islam, Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta : Lkis, 2010).
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Ghalia Indonesia : Bogor)
- Munafrizal Manan, *Penemuan hukum oleh Mahkamah Konstitusi*, (Mandar Maju : Bandung, 2012).
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Sinar Grafika : Edisi Kedua, Juni 2016).
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta Erlangga :1985).
- Otje Salman dan Anton F. Susanto. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (PT. Refika Aditama : Bandung, 2009).
- Pangaribuan Luhut M.P., *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advocat di Pengadilan*, (Papas Sinar Sinanti : Jakarta, 2017).
- Pangaribuan Alboin, *Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi (Lex Specialis Derogat Legi Generali)*, (Mizwar : 2017).
- Pound Roscoe, *An Introduction to the Philosophy of Law, diterjemahkan oleh Koh. Radjab, suatu pengantar ke Filsafat hukum*, (Bharatara, Jakarta, 1963).
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, (Jakarta : Sumber Ilmu Jaya, 2006).

- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Absolutisme*, (Bandung.1995).
- , *Rekonstruksi Asas Pidana Tanpa Kesalahan. Geen Straf Zonder Schuld*, (PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.2017).
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Alumni Bandung : 1995).
- Soedikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Lyberty : Yogyakarta, Cetakan Kelima, April 2007).
- Soedikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013).
- Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Rajagrafindo Persada : Jakarta, 2015)
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-PRESS : Jakarta, 2006).
- , *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung : PT. Alumni 1986)
- Sudarto, *Hukum dan hukum Pidana*, (Alumni Bandung : Cetakan ke-empat. 1996).
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2016)
- Tim Wahyu Media, *Pedoman Resmi UUD 1945 dan Perubahannya*. (PT. Wahyu Media : Jakarta, 2017)
- Hodio Potimbang, S.I.P, SH, MH, M.HUM, *Sejarah Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Majalah Hukum tahun XXXII No. 378 Mei 2017.
- Dr. H. Supandi, S.H., M. Hum, *Capaian Pembaruan Oleh Mahkamah Agung RI dan Pembentukan Persepsi Publik Terhadap Peradilan*, Majalah Hukum tahun XXXII No. 371 Oktober 2016.
- Sudikno Mertokusomo, *Relevansi Peneguhan Etika Profesi Bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Makalah disampaikan dalam Seminar 50 tahun Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia di UGM tanggal 26 Agustus 1995.

### **Peraturan Perundang-Undangan.**

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang No 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001
- Undang-Undang Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 4 tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan tanggal 19 April 2016
- Perja-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010, tentang Tata Kelola Administrasi dan tehnik Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus dalam Buku II Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Agung.

#### **Jurnal/Makalah/Tesis/Disertasi**

- Aan van W. Thomas, *A Woprlrd Rule of law, Diklat USA SMU* (Press 1971), diterjemahkan oleh Munir Fuady
- Dr. H. Amran Suadi, SH, MH, MM, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Menurut Pandangan Teori Kedaulatan Hukum Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, *Varia Peradilan : Majalah Hukum* tahun XXXI No. 367 Juni 2016.
- Prof. Dr. H. Bagir manan, SH, M.C.L., *Etika Pelaksanaan Kehidupan Berbangsa*, *Majalah Hukum* tahun XXXII No. 383 Oktober 2017.
- , *Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman*, *Majalah Hukum* tahun XXXII No. 375 Februari 2017.
- Gultom Dr. Binsar M., SH, SE, MH, *Hormati Indepedensi Badan Peradilan*, *Varia Peradilan : Majalah Hukum* tahun XXX No. 350 Januari 2015.
- Dr. Fahmiron, S.H., M. Hum, *Diskursus Antara Kebebasan Hakim Dengan Asas Legalitas*, *Majalah Hukum* tahun XXXII No. 381 Agustus 2017.
- Mahyudin Igo, *Peran Penasihat Hukum Dalam Menyempurnakan Pertimbangan Hukum Terhadap Suatu Putusan*, *Majalah Hukum* tahun XXXII No. 374 Januari 2017.

## Internet

Novrieza Rahmi, 2012, "Kejagung Verzet atas Putusan Praperadilan Chevron", *Hukum Online*, 03 Desember 2012, diakses 15 September 2017.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50bcbdc4432dd/kejagung-iverzet-i-atas-putusan-praperadilan-chevron>

Nov/Ash, 2013, "Hakim Praperadilan Chevron Kena Hukuman Disiplin", *hukum Online*, 05 April 2013, diakses 15 September 2017.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt515efe1c0bc32/hakim-praperadilan-chevron-kena-hukuman-disiplin>

Hendra Budiman, 2015, "Tersangka Bebas oleh Putusan Peradilan". 03 Pebruari 2015, diakses 15 September 2017. [https://www.kompasiana.com/hendra\\_budiman](https://www.kompasiana.com/hendra_budiman)

Ambaranie Nadia Kemala Movanita, 2015, "Bagir Manan : Putusan hakim Sarpin Nekat Benar !", *Kompas.com*, 24 April 2015 diakses 15 September 2017.

<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/24/06131051/Bagir.Manan.Putusan.Hakim.Sarpin.Nekat.Benar>

Abraham Utama, 2015, "KY Hukum Sarpin Enam Bulan Non-Palu", *CNN. Indonesia*, Juni 2015. diakses 15 September 2017.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150630201946-12-63429/ky-hukum-hakim-sarpin-enam-bulan-non-palu/>

Faiq Hidayat, "Hakim sarpin Rizaldi Dimutasi ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru", 2015, *Merdeka.com*, 22 Oktober 2015. diakses 15 September 2017.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/hakim-sarpin-rizaldi-dimutasi-ke-pengadilan-tinggi-pekanbaru.html>

Abba Gabrilin, 2016, MA Tolak PK KPK atas putusan Praperadilan Hadi Poernomo", *Kompas.Com*, Juni 2016, diakses 15 September 2017.

<http://nasional.kompas.com/read/2016/06/28/17363961/ma.tolak.pk.yang.diajukan.kpk.atas.praperadilan.hadi.poernomo>

Tempo.co, 2017, "Tolak PK KPK MA : Penyidikan Hadi Purnomo bisa", *nasional.tempo.co*, 02 Februari 2017. diakses 15 September 2017

<https://nasional.tempo.co/read/842455/tolak-pk-kpk-ma-penyidikan-hadi-purnomo-bisa-dilanjutkan>

Fajar Febrinto, 2017, "Pakar Hukum Sebut Putusan Praperadilan Setya Novanto Bisa Gugur", *nasional.tempo.co*, 06 Oktober 2017. diakses 15 September 2017.

<https://nasional.tempo.co/read/1022447/pakar-hukum-sebut-putusan-praperadilan-setya-novanto-bisa-gugur>